



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FLORENSIUS KAHA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 513126

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1059 m2/1059 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 735.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HILUX 2.5G DC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,5D EXCEED AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. MOTOR, HONDA NF11B2D1 M/T REVO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA K1H02N14LCA/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 108.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.231.390

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.983.531.390

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.983.531.390

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.